

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG

DINAS PERTANIAN

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022 dapat terselesaikan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atau Evaluasi Kinerja.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melaporkan kinerjanya yang diukur pencapaian kinerja misi, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022 dan menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Jombang, 30 Desember 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Cascading Kinerja	2
1.4 Peta Proses Bisnis	3
1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	3
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 7
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	7
2.2 Susunan Organisasi	8
2.3 Data Kepegawaian	9
2.4 Rencana Strategis 2018-2023	11
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
2.6 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Realisasi Anggaran	31
3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	40



BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
 Lampiran	 42



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Golongan	9
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2.4	Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	12
Tabel 2.5	Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022	15
Tabel 2.6	Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022	18
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	22
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Nasional tahun 2022	24
Tabel 3.6	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	26
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Anggaran	28
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	30
Tabel 3.9	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	31
Tabel 3.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	32
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program	33
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022	36
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2022	39



Tabel 3.14	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022	39
------------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	9
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	42
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-P) Tahun 2022	44
Lampiran 3 Peta Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	
Lampiran 4 Cascading Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022	
Lampiran 5 Peta Proses Bisnis	
Lampiran 6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, penilaian dan pelaporan kinerja menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak dalam suatu instansi pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis yang memadai terhadap pengukuran kinerja. Atas dasar hal tersebut diatas, untuk mempertanggungjawabkan mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jombang perlu menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023, yaitu meningkatkan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi bagi Bupati yang merupakan pimpinan pemerintah daerah serta pihak lain yang berkepentingan (Stakeholder).



1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang serta sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menjadikan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif.
- Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- Terjalinnnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

1.3 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terutama terkait dengan pencapaian misi ketiga dari RPJMD kabupaten yaitu meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan potensi unggulan lokal dan industri, serta misi pertama dari RPJMD yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.



Indikator tujuan RPJMD dari misi ketiga ini adalah meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mendukung tujuan RPJMD dari misi ketiga dengan upaya meningkatkan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mendukung tujuan RPJMD dari misi pertama dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah (1) Meningkatkan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; (2) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Cascading Dinas Pertanian Kabupaten Jombang disajikan sebagaimana terlampir.

1.4 Peta Proses Bisnis

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis sehingga tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana terlampir.

1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor X.700/323/415.15/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 s.d Semester II tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022



adalah 70,83 termasuk kategori BB dengan predikat "Sangat Baik" dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan kinerja (mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai hingga rencana Aksi) **belum** menggambarkan keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading);
- b. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Monitoring dilakukan mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan hingga capaiannya, serta telah disebutkan hambatan, upaya dan rekomendasi. Namun atas rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti dengan upaya/langkah nyata. Selain itu, target jangka menengah dalam renstra berkaitan erat dengan pencapaian RPJMD Kabupaten Jombang sehingga diperlukan peran serta dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Jombang dalam penetapan mekanisme (SOP) maupun pelaksanaan monitoring target jangka menengah dalam Renstra OPD;
- c. Target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, namun capaian target kinerja **belum** digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan;
- d. Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 34,32 dari bobot 30% atau dengan capaian 61,07% (A) yang berarti bahwa berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yakni pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara triwulan berdasarkan jadwal dan mekanisme atau SOP yang jelas, serta telah dilengkapi dengan dokumentasi hasil pengukuran kinerja, namun **belum** **didapati** tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja. Oleh karena itu, dalam implementasinya hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja efektif dan efisien;

e. Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,91 dari bobot 15% atau dengan capaian 52,73% (CC) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria sebagian kecil (>25% - 50%) telah terpenuhi, dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sarana prasarana, hanya menyajikan efisiensi sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya keuangan;
- Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya target kinerja yang telah tercapai di awal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran;

f. Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 16,47 dari bobot 25% atau dengan capaian 65,87% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria sebagian besar telah terpenuhi sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yakni hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal hanya sebatas menilai aspek keberadaan dan kualitas, sedangkan aspek pemanfaatan belum dinilai secara memadai;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi);

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Segera melakukan evaluasi dokumen perencanaan kinerja (mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, DPA, Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai hingga Rencana Aksi) dengan Cascading sehingga terbentuk keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan;



- b. Segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Monitoring Target Jangka Menengah dalam Renstra dengan upaya/langkah nyata;
- c. Segera menyusun dan mengkoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Jombang mekanisme/SOP untuk monitoring Renstra secara periodik;
- d. Menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan atas hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- e. Segera menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja serta memanfaatkannya sebagai dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- f. Menambahkan informasi efisiensi atas sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja;
- g. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja;
- h. Memerintahkan kepada tim Evaluator SAKIP internal OPD agar melakukan pendalaman yang memadai tidak hanya pada aspek keberadaan dan kualitas, namun juga pada aspek pemanfaatan;
- i. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Tugas pokok Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang pertanian. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian;
- Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset; dan
 2. Berkoordinasi dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura, berkoordinasi dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura, berkoordinasi dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perlindungan, Pasca Panen, dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura, berkoordinasi dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian. Masing-masing kepala bidang dapat berkoordinasi dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.	I	-
3.	II	10
4.	III	14
5.	IV	65

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 2.1 terlihat bahwa komposisi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berdasarkan tingkatan golongan, jumlah paling banyak adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada golongan III sebanyak 65 orang, disusul pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada golongan IX sebanyak 45 orang dan pegawai non ASN sebanyak 43 orang. Selain informasi komposisi pegawai berdasarkan golongan, terdapat juga informasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
(1)	(2)	(3)
1.	S3	-
2.	S2	12
3.	S1	126
4.	D3	15
5.	SMA Sederajat	51

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 2.2 terlihat bahwa komposisi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berdasarkan tingkatan pendidikan paling banyak adalah pegawai pada tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 126 orang dan paling sedikit adalah pegawai pada tingkat pendidikan Strata 2 (S2). Selain informasi komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat juga informasi pegawai berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-laki	123
2.	Perempuan	81

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 2.3 terlihat bahwa komposisi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menurut jenis kelamin adalah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 123 orang dan pegawai perempuan sebanyak 81 orang.

2.4 Rencana Strategis 2018-2023

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

a. Visi

Visi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu:

"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"

Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun kedepan, yakni nilai berkarakter dan berdaya saing.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tiga Misi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
- 2) Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya;

- 3) Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Dinas Pertanian menjalankan misi Kepala Daerah, khususnya misi pada poin pertama, yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional" melalui peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, serta misi ketiga, yaitu "Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri" melalui peningkatan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.

c. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berikut ini tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

- 1) Meningkatkan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

d. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau hasil yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang guna mendukung tema pembangunan dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah

Adapun dalam dalam pencapaian visi dan misi yang mengacu pada misi ke satu (1) dan tiga (3) RPJMD Kabupaten Jombang terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai visi dan misi itu sendiri:



1) Faktor penghambat pencapaian visi dan misi antara lain:

- Tingginya alih fungsi atau konversi lahan pertanian;
- Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
- Belum optimalnya tingkat kesuburan lahan;
- Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian JIUT (jaringan irigasi tingkat usaha tani), JIDES (jaringan irigasi desa), dan jalan usaha tani (JUT);
- Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya seperti alat mesin pertanian (ALSINTAN);
- Belum optimalnya transfer teknologi kepada petani;
- Terbatasnya akses petani terhadap permodalan (pola pinjaman permodalan dan tingkat suku bunga masih belum pro petani);
- Masih tingginya tingkat kehilangan produk saat panen;
- Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan;
- Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran;
- Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian dan belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis;
- Adanya kecenderungan terjadinya proses *levelling off* (penyamarataan atau penyeragaman kualitas atau mutu) pada produk pertanian lapang;
- Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai;
- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani;
- Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani;
- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani;
- Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani;
- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan penyuluh pertanian;
- Posisi tawar petani masih rendah;
- Rendahnya Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman pangan.

2) Faktor pendorong pencapaian visi dan misi antara lain:

- Adanya sinergitas dan program dengan OPD terkait;
- Lahan pertanian yang luas;
- Jumlah kelompok tani binaan yang cukup banyak;



- Kebutuhan pangan meningkat;
- Kebijakan pemilik modal untuk menjalin kemitraan;
- Potensi areal pertanian;
- Tersedianya mekanisasi atau alsintan;
- Kelembagaan HIPPA atau GHIPPA;
- Komitmen pimpinan daerah terhadap kegiatan penyuluhan pertanian;
- Tersedianya kelembagaan poktan dan gapoktan;
- Adanya mitra sektor pertanian;
- Terbukanya kerjasama dengan media massa sebagai saran penyuluhan pertanian;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan.

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja, dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Berikut ini Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022.

Tabel 2.5 Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan hortikultura	Tapi pemenuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan hortikultura	1,100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik	Kita evaluasi ANP Pengingat Dasar	77,5 (88)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya lahan	Program Perencanaan dan Pengembangan Swakelola Pertanian	Persentase pemanfaatan sumber daya pertanian	24,73%	17.397.154.468
2.	Meningkatnya hasil index Pertanian (IP)	Program Penyediaan dan Penguatan Swakelola Pertanian	Nilai index Pertanian (IP)	228,7%	3.495.941.380
3.	Meningkatnya kelayakan hasil produksi pertanian	Program Pengembangan dan Penguatan Swakelola Pertanian	Persentase kelayakan produksi	6,221%	445.312.150
4.	Meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya pertanian	Program Efisiensi Swakelola Pertanian	Persentase efisiensi penggunaan	1-3%	11.546.728
5.	Meningkatnya akuntabilitas anggaran	Program Efisiensi Swakelola Pertanian	Persentase produksi pertanian		3.247.361.435
			Padat	0,53%	
			Agak	0,53%	
			Kurang	0,53%	
			Ekstrem	0,54%	
			Ekstrem	0,56%	
			Ekstrem	0,56%	
			Ekstrem	0,56%	
			Ekstrem	0,56%	
			Ekstrem	0,56%	
6.	Meningkatnya kinerja anggaran	Program Efisiensi Swakelola Pertanian	Persentase kinerja anggaran	10,0%	20.183.377.662

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

2.6 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan seleksi dari indikator – indikator kinerja sasaran yang digunakan oleh organisasi. Berikut ini Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022.



Tabel 2.6 Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022

2. **Tujuan** : Meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pertanian
3. **Indikator** :
1. Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian
 2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak
 3. Peningkatan aksesibilitas layanan pertanian
 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
 5. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pertanian
 6. Peningkatan keberlanjutan pertanian

NO	INDIKATOR	DEFINISI/ KETERANGAN	FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Produksi pertanian per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian
2	Produksi pertanian per hektar per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian

NO	INDIKATOR	DEFINISI/ KETERANGAN	FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Produksi pertanian per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian
2	Produksi pertanian per hektar per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian
3	Produksi pertanian per hektar per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian
4	Produksi pertanian per hektar per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian
5	Produksi pertanian per hektar per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian
6	Produksi pertanian per hektar per hektar	Luas lahan pertanian per hektar	$\text{Produksi (kg)} \div \text{Luas lahan (ha)}$	SPSP, BPS, Dinas Pertanian

Sumber: BPS, Dinas Pertanian 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pertanian telah melaksanakan penilaian capaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Untuk mempermudah menginterpretasikan pencapaian indikator sasaran dalam penilaian capaian kinerja digunakan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Bupati Jombang No. 47 Tahun 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	>110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2.	>90% - 110%	Baik (Berhasil)
3.	>70% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4.	>50% - 70%	Kurang
5.	0% - 50%	Sangat Kurang

Sumber: Perbup Jombang No. 47 Tahun 2022

Adapun capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



a. Capaian Kinerja Tahun 2022

Adapun rincian capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1,10%	4,22%	120,00%	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	77,5 (BB)	75,83 (BB)	97,85%	Berhasil
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisasi pertanian	Persentase pemanfaatan mekanisasi pertanian	24,73%	26,65%	107,76%	Berhasil
2.	Meningkatnya nilai indeks pertanaman (IP)	Nilai indeks pertanaman (IP)	228,70	221,91	97,03%	Berhasil
3.	Menurunnya kehilangan hasil (losses) pada budidaya pertanian	Persentase kehilangan hasil (losses)	0,221%	0,130%	120,00%	Sangat berhasil



4.	Meningkatnya usaha pertanian yang mendapat pembinaan perizinan	Persentase izin usaha pertanian	1,16%	1,32%	113,79%	Sangat berhasil
5.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian				
		Padi	0,55%	3,30%	120,00%	Sangat berhasil
		Jagung	0,55%	0,67%	120,00%	Sangat berhasil
		Kedelai	0,55%	3,76%	120,00%	Sangat berhasil
		Cabai besar	0,55%	0,60%	108,92%	Berhasil
		Cabe rawit	0,55%	0,30%	54,60%	Kurang
		Bawang merah	0,55%	0,87%	120,00%	Sangat berhasil
		Tembakau	0,55%	0,12%	21,82%	Sangat kurang
		Tebu	0,55%	-3,78%	0,00%	Sangat kurang
		Kopi	0,55%	0,77%	120,00%	Sangat berhasil
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00%	Berhasil
Rerata					96,361%	Berhasil

Sumber: data Dinas Pertanian 2022



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 indikator kinerja sasaran Tahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagaimana Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 8 indikator kinerja masuk kriteria sangat berhasil, 5 indikator kinerja masuk kriteria berhasil, 1 indikator kinerja masuk kriteria kurang, dan 2 indikator kinerja masuk kriteria sangat kurang. Rata-rata capaian realisasi adalah 96,361% dan masuk dalam kategori berhasil.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Berikut ini perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI		
				TAHUN		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1,10%	N/A	1,10%	4,22%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	77,5 (BB)	70,20 (BB)	70,45 (BB)	75,83 (BB)
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI		
				TAHUN		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisasi pertanian	Persentase pemanfaatan mekanisasi pertanian	24,73%	N/A	24,48%	26,65%



2.	Meningkatnya nilai indeks pertanaman (IP)	Nilai indeks pertanaman (IP)	228,70	226,10	227,20	221,91
3.	Menurunnya kehilangan hasil (losses) pada budidaya pertanian	Persentase kehilangan hasil (losses)	0,221%	N/A	0,224%	0,130%
4.	Meningkatnya usaha pertanian yang mendapat pembinaan perzinan	Persentase izin usaha pertanian	1,16%	N/A	N/A	1,32%
5.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian				
		Padi	0,55%	N/A	1,58%	3,30%
		Jagung	0,55%	N/A	1,08%	0,67%
		Kedelai	0,55%	N/A	0,44%	3,76%
		Cabai besar	0,55%	N/A	0,55%	0,60%
		Cabe rawit	0,55%	N/A	0,53%	0,30%
		Bawang merah	0,55%	N/A	0,60%	0,87%
		Tembakau	0,55%	N/A	0,53%	0,12%
		Tebu	0,55%	N/A	0,50%	-3,78%
		Kopi	0,55%	N/A	0,40%	0,77%
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/A	100%	100%

Sumber: data Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagaimana Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran dan program untuk tahun 2020 tidak terdapat angka realisasi kinerja untuk dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022 karena



adanya perubahan indikator sasaran dan program mengikuti Permen No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Realisasi kinerja indikator sasaran dan program yang dapat dibandingkan adalah realisasi tahun 2021 dengan 2022. Realisasi sasaran strategis pada tahun tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, begitupun dengan realisasi program kegiatan. Namun, terdapat indikator pada sasaran program yang mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu peningkatan produktivitas pertanian komoditas tanaman padi dari 1,58% pada tahun 2021 menjadi 3,30% pada tahun 2022.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Berikut ini perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen rencana strategis (Renstra) dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1,2%	4,22%	120%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	80,00 (A)	75,83 (BB)	94,79%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisme pertanian	Persentase pemanfaatan mekanisme pertanian	23,27%	26,65%	107,76%
2.	Meningkatnya nilai indeks pertanaman (IP)	Nilai indeks pertanaman (IP)	230,00	221,91	97,03%
3.	Menurunnya kehilangan hasil (losses) pada budidaya pertanian	Persentase kehilangan hasil (losses)	0,391%	0,136%	120,00%
4.	Meningkatnya usaha pertanian yang mendapat pembinaan perizinan	Persentase izin usaha pertanian	1,66%	1,32%	113,79%
5.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian			
		Padi	0,60%	3,30%	120,00%
		Jagung	0,60%	0,67%	120,00%
		Kedelai	0,60%	3,76%	120,00%
		Cabai besar	0,60%	0,60%	108,92%
		Cabe rawit	0,60%	0,30%	54,60%
		Bawang merah	0,60%	0,87%	120,00%
		Tembakau	0,60%	0,12%	21,82%
		Tebu	0,60%	-3,78%	0,00%
		Kopi	0,60%	0,77%	120,00%



6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00%
----	---------------------------------------	---	------	------	---------

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra sebagaimana Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan untuk mencapai target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra adalah cukup baik. Total 16 indikator kinerja rerata tingkat kemajuan untuk mencapai target jangka menengah cukup baik dan sesuai dengan perencanaan. Namun, sasaran program dengan indikator peningkatan produktivitas pertanian komoditas tebu tidak memiliki kemajuan. Tingkat kemajuan yang kecil diakibatkan gagal panen karena perubahan cuaca yang belum bisa diantisipasi dengan baik.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

Realisasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2022 yang dibandingkan dengan standar nasional sesuai data realisasi kinerja Kementerian Pertanian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Nasional Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL TAHUN 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian			
		Padi	3,30%	0,61%	120,00%
		Jagung	0,67%	0,83%	80,72%
		Cabe (Besar+Rawit)	0,90%	7,62%	11,81%
		Bawang Merah	0,87%	3,96%	21,97%

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022



Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2022 dengan realisasi kinerja nasional sesuai data Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian tahun 2022 sebagaimana Tabel 3.5. Pada dasarnya peningkatan produktivitas tanaman padi dan jagung bersifat substitusi atau saling menggantikan, yang mana ketika produktivitas padi tinggi maka berpengaruh pada penurunan produktivitas jagung. Hal ini disebabkan adanya pergantian atau substitusi penggunaan lahan pertanian. Saat lahan pertanian dan kondisi lingkungan mendukung untuk menanam padi maka tanaman kedelai dan jagung tidak akan ditanam, begitupun sebaliknya.

Target peningkatan produktivitas untuk tanaman padi, jagung, cabe (penjumlahan cabe besar dan cabe rawit), dan bawang merah pada tahun 2021 adalah 0,55% dan terealisasi sebesar masing-masing 3,30%; 0,67%; 0,90%; dan 0,87%. Tabel 3.5 juga menunjukkan kontribusi peningkatan produktivitas tanaman padi, jagung, cabe, dan bawang merah di Kabupaten Jombang yang cukup baik terhadap peningkatan produktivitas nasional. Mengingat jumlah kabupaten/kota di Indonesia adalah 514 kabupaten/kota, maka dapat disimpulkan sumbangsih Kabupaten Jombang cukup besar. Karena keterbatasan data untuk membandingkan kinerja kabupaten dan nasional, sehingga data yang kita bandingkan dengan data nasional mengikuti data yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan sasaran program dengan menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target. Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijabarkan beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Dinas Pertanian tahun 2022 serta tindak lanjut atas penyebab kegagalan yang dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

NO	BASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1. Banyaknya bantuan yang diberikan bagi petani, seperti bantuan benih, bibit, dan sarana prasarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian;	1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian; 2. Semakin menurunnya kualitas dan daya dukung pada lahan pertanian; 3. Minimnya pemanfaatan teknologi budidaya pertanian tepat guna, spesifik lokasi dan berkelanjutan oleh petani.	1. Penerapan dan sosialisasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui penyusunan peta lahan pertanian yang akan dipanteken menjadi lahan pertanian berkelanjutan. 2. Meminimalisir penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pertanian dengan memanfaatkan bahan biologis; 3. Peningkatan peran penyuluh dalam pemanfaatan teknologi budidaya pertanian berkelanjutan.

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	1. Penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu.	1. Kurangnya kapasitas/kuualitas SDM pegawai baik terkait kemampuan teknis maupun manajerial; 2. Sistem monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja dinas dan pegawai, belum optimal.	1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis dan seminar; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja secara sistematis dan terorganisir
----	---	-------------------------------------	--	--	--

Sumber: data Dinas Pertanian 2022

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Aktual} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka terjadi efisiensi;
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang dari 1 (satu), maka tidak terjadi efisiensi;
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target indikator kinerja pada periode tersebut tercapai.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien, yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	120,00%	93,54%	1,28
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	97,85%	92,41	-
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisasi pertanian	Persentase pemanfaatan mekanisasi pertanian	107,76%	94,47%	1,14
2.	Meningkatnya nilai indeks pertanaman (IP)	Nilai indeks pertanaman (IP)	97,03%	96,42%	-
3.	Menurunnya kehilangan hasil (losses) pada budidaya pertanian	Persentase kehilangan hasil (losses)	120,00%	85,27%	1,41
4.	Meningkatnya usaha pertanian yang mendapat pembinaan perizinan	Persentase izin usaha pertanian	113,79%	99,15%	1,15



5.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian		89,69%	-
		Padi	120,00%		
		Jagung	120,00%		
		Kedelai	120,00%		
		Cabai besar	108,92%		
		Cabe rawit	54,60%		
		Bawang merah	120,00%		
		Tembakau	21,82%		
		Tebu	0,00%		
		Kopi	120,00%		
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	92,41%	1,06

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan data efisiensi penggunaan anggaran diketahui bahwa pada sasaran strategis pertama terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,14 dan tidak terdapat efisiensi anggaran pada sasaran strategis kedua karena capaian kinerja yang tidak tercapai. Efisiensi anggaran juga tidak tercapai pada sasaran program indikator nilai indeks pertanaman (IP) dan peningkatan produktivitas budidaya pertanian dikarenakan capaian kinerja tidak tercapai. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Berikut efisiensi penggunaan sumber daya manusia di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2022			SUMBER DAYA MANUSIA 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KESETUJUAN	KESETUJUAN	% KETERSEDIAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1,10%	4,22%	120,00 %	376	155	41,22%
% Capaian Kinerja					120,00 %	% Ketersediaan SDM		41,22%
Tingkat Efisiensi = 2,91 (Efisiensi Tercapai)								
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	77,5 (BB)	75,83 (BB)	97,85%	376	155	41,22%
% Capaian Kinerja					97,85%	% Ketersediaan SDM		41,22%
Tingkat Efisiensi = - (Tidak Tercapai)								

Sumber: data Dinas Pertanian 2022



Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui bahwa persentase ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pertanian adalah 41,22%, didapatkan dari perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pegawai sebagaimana Peta Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana terlampir. Sehingga diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada capaian kinerja sasaran strategis pertama sebesar 2,91. Pada sasaran strategis kedua tidak terdapat efisiensi karena realisasi nilai evaluasi AKIP tidak tercapai. Efisiensi penggunaan sarana prasarana kantor juga perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Berikut efisiensi penggunaan sarana prasarana kantor di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Kantor

NO	JENIS SARANA PRASARANA KANTOR	SARANA PRASARANA KANTOR		
		KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	% KETERSEDIAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laptop	155	34	21,94%
2.	Printer	155	34	21,94%
RERATA				21,94%

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 3.9 diketahui bahwa persentase ketersediaan sarana prasarana kantor masih cukup rendah yaitu 21,94%. Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana menyesuaikan ketersediaan pegawai. Jenis sarana prasarana yang tertulis merupakan sarana prasarana dengan score paling penting dalam menunjang terlaksananya kegiatan, yaitu laptop dan printer. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis pertama sebagaimana Tabel 3.2 maka efisiensi sarana prasarana kantor dapat dihitung, yaitu 5,47%. Namun adanya efisiensi sarana prasarana tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan, mengingat ketersediaan dua jenis sarana prasarana tersebut masih cukup jauh dari kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang berhasilnya mencapai sasaran strategis ke dua, yaitu nilai SAKIP yang belum mencapai target kinerja.



g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Dalam pelaksanaan 2 sasaran strategis dan 6 sasaran program yang telah dilaksanakan tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 6 program yang terbagi ke dalam 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan tersebut telah menunjang keberhasilan dalam capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan (PK-P) tahun 2022. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian perlu dilakukan di masa mendatang sehingga tidak terdapat sasaran strategis, program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang tidak mencapai target.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 pagu anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk melaksanakan program dan kegiatan setelah P-APBD adalah sebesar Rp. 47.873.217.465,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 44.552.144.071,- atau sebesar 93,06%. Alokasi anggaran setiap sasaran kinerja (strategis) Dinas Pertanian Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	27.678.139.473	57,82%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	20.195.077.992	42,18%
Total Anggaran			47.873.217.465	100%

Sumber: data Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 3.10 diketahui bahwa total anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah Rp. 47.873.217.465,- dengan rincian, alokasi anggaran untuk sasaran strategis "Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura" adalah sebesar Rp. 27.678.139.473,- atau 57,82% dari total anggaran. Sedangkan alokasi anggaran untuk sasaran strategis "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan" yang didalamnya termasuk alokasi penganggaran rutin adalah sebesar Rp. 20.195.077.992,- atau 42,18% dari total anggaran.



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat realisasi kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan. Berikut realisasi kinerja dan anggaran sesuai dengan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1,10%	4,22%	120,00 %	27.678.139.473	25.890.285.581	93,54%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	77,5 (BB)	75,83 (BB)	97,85%	20.195.077.992	18.661.858.490	92,41%

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 3.11 diketahui bahwa capaian kinerja dan anggaran sasaran strategis "Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura" memiliki target kinerja 1,10% dan terealisasi 4,22% atau 120,00%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.678.139.473,- dan terealisasi Rp. 25.890.285.581,- atau 93,54%. Sedangkan capaian kinerja dan anggaran sasaran strategis "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan" memiliki target kinerja 77,50 dan terealisasi 75,83 atau 97,85%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.195.077.992,- dan terealisasi Rp. 18.661.858.490,- atau 92,41%. Secara lebih detail untuk capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian	24,73%	26,65%	107,76%	17.397,3	18.435,3	94,47%
					14.468	28.128	
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai Indeks Pertanian (IP)	228,70	221,91	97,03%	3.855,66	3.717,55	96,42%
					1.390	0,027	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kehilangan Hasil (Losses)	0,221%	0,130%	120,00%	645.812	550.678	85,27%
					350	910	
Meningkatnya usaha pertanian yang mendapat pembinaan perizinan	Persentase izin usaha pertanian	1,16%	1,32%	113,79%	31.389,7	31.121,7	99,15%
					50	50	
Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian				5.747,96	5.155,60	99,15%
					1.515	6.766	
	Padi	0,55%	3,30%	120,00%			
	Jagung	0,55%	0,67%	120,00%			
	Kedelai	0,55%	3,76%	120,00%			
	Cabai Besar	0,55%	0,60%	108,92%			
	Cabai Rawit	0,55%	0,30%	54,60%			
	Bawang Merah	0,55%	0,87%	120,00%			
	Tembakau	0,55%	0,12%	21,82%			

	Tebu	0,55%	-3,78%	0,00%			
	Kopi	0,55%	0,77%	120,00%			
Penunjang	Persentase	100%	100%	100,00%	20.195.0	18.661.8	92,41%
Utusan	Rata-Rata				77.992	58.490	
Pemerintahan	Capaian						
Daerah	Kinerja						
Kabupaten/Kota	Aparatur						
a							

Sumber: data Dinas Pertanian 2022

Berdasarkan Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dapat diketahui bahwa:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja persentase pemanfaatan mekanisasi pertanian sebesar 23,04%, dapat terealisasi sebesar 26,65% atau 115,67%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.397.314.468,- dan terealisasi Rp. 16.435.328.128,- atau dengan capaian anggaran sebesar 94,47%.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target kinerja nilai indeks pertanaman (IP) sebesar 228,70, dapat terealisasi sebesar 221,91 atau 97,03%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.855.661.390,- dan terealisasi Rp. 3.717.550.027,- atau dengan capaian anggaran sebesar 96,42%.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target kinerja persentase kehilangan hasil (losses) sebesar 0,394%, dapat terealisasi sebesar 0,130% atau 167,01%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 645.812.350,- dan terealisasi Rp. 550.678.910,- atau dengan capaian anggaran sebesar 85,27%.
- Program Perizinan Usaha Pertanian dengan target kinerja persentase izin usaha pertanian sebesar 1,16% dapat terealisasi sebesar 1,32% atau 113,79%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.369.750,- dan terealisasi Rp. 31.121.750,- atau dengan capaian anggaran sebesar 99,15%.

- e. Program Penyuluhan Pertanian dengan target kinerja peningkatan produktivitas pertanian setiap komoditas strategis sebesar 0,55%, dengan rata-rata realisasi kinerja 2,61% atau 474,11%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.747.961.515,- dan terealisasi Rp. 5.155.606.766,- atau dengan capaian anggaran sebesar 99,15%.
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja persentase rata-rata capaian kinerja aparatur sebesar 100%, dapat terealisasi sebesar 100% atau 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.195.077.992,- dan terealisasi Rp. 18.661.858.490,- atau dengan capaian anggaran sebesar 92,41%.

Selain informasi terkait anggaran sasaran dan program kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, juga terdapat informasi terkait belanja langsung atau belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dianggarkan pada belanja SKPD.

Berikut rincian belanja langsung Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Prog. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.897.314.468	16.438.328.128	94,47
Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	17.897.314.468	16.438.328.128	94,47
Sub. Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8.257.379.722	7.762.159.554	94,00
Sub. Keg. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	9.139.934.746	8.676.168.574	94,89
Prog. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.855.661.390	3.717.550.027	96,42
Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian	337.290.806	323.209.800	95,83
Sub. Keg. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	286.425.000	272.708.000	95,21
Sub. Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	50.865.800	50.501.000	99,28

Keg. Pembangunan Prasarana Pertanian	3.318.379.990	3.394.341.027	96,47
Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.420.442.570	1.399.057.085	98,50
Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.357.028.000	1.285.285.592	94,65
Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	590.000.000	559.988.150	94,91
Sub. Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	150.000.000	150.000.000	100
Prog. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	645.812.358	559.678.910	85,27
Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	645.812.358	559.678.910	85,27
Sub. Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	543.635.750	451.035.810	82,97
Sub. Keg. Pencegahan, Penanganan Ketakutan Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	34.437.800	22.058.800	64,24
Sub. Keg. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	77.738.800	77.588.300	99,81
Prog. Perizinan Usaha Pertanian	31.389.750	31.121.750	99,15
Keg. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Kabupaten/Kota	31.389.750	31.121.750	99,15
Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	31.389.750	31.121.750	99,15
Prog. Penyuluhan Pertanian	5.747.961.515	5.155.636.766	89,69
Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.747.961.515	5.155.636.766	89,69
Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.067.881.888	951.429.570	89,10
Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	4.062.893.650	3.673.206.838	90,41
Sub. Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	64.085.150	55.916.200	87,25
Sub. Keg. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	11.345.600	0	0
Sub. Keg. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	541.975.450	475.054.100	87,65

Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	20.195.877.992	19.661.858.490	92,41
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.939.750	22.788.500	84,58
Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.512.000	8.712.000	78,85
Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.427.750	16.076.500	87,22
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.069.897.892	16.558.097.506	92,20
Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tidak Langsung		
Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	281.287.200	254.780.000	90,58
Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	2.290.000	2.160.000	94,32
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.600.000	7.041.813	66,43
Sub. Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.600.000	7.041.813	66,43
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.238.080	647.317.812	97,02
Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.890.400	20.587.450	98,99
Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.280.200	264.904.600	94,18
Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.773.400	174.859.830	99,48
Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.988.000	23.787.600	95,21
Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.955.000	75.803.000	99,80
Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.372.000	87.078.132	98,54
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.448.000	837.810.678	91,03
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.440.000	127.762.235	80,13
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	760.000.000	709.348.444	93,32
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.078.550	462.956.500	97,46
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.183.400	40.022.000	99,60

Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.593.150	145.730.500	94,27
Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.544.000	224.813.000	98,67
Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.950.000	52.430.000	99,02
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.700.000	25.810.000	96,67
Sub. Keg. Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.700.000	25.810.000	96,67
Total	30.087.666.973	28.150.156.485	93,56

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Dari Tabel 3.13 diketahui bahwa total anggaran belanja langsung Dinas Pertanian adalah Rp. 30.087.666.973,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.150.156.485,- atau 93,56%. Selain informasi terkait belanja langsung, terdapat informasi terkait belanja tidak langsung atau belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut rincian belanja tidak langsung Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.785.550.492	16.401.987.586	92,22

Sumber: data, Dinas Pertanian 2022

Dari Tabel 3.13 diketahui bahwa total anggaran belanja tidak langsung Dinas Pertanian adalah Rp. 17.785.550.492,- dengan realisasi anggaran tidak langsung sebesar Rp. 16.401.987.586,- atau 92,22%. Selain sebagai SKPD Teknis, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang juga sebagai SKPD Penghasil. Realisasi retribusi atau pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022

No.	Uraian	Target	Realisasi	
		Rp	Rp	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Hasil Penjualan Aset-Aset Lainnya	814.521.027	480.000.000	58,93

Sumber: data Dinas Pertanian 2022

Dari Tabel 3.14 diketahui bahwa target retribusi atau pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah Rp. 814.521.027,- dengan realisasi PAD sebesar Rp. 480.000.000,- atau 58,93%. Realisasi retribusi atau pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022 masih sangat jauh dari target.

Rendahnya realisasi kegiatan dikarenakan bencana banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman berupa wereng dan tikus yang menyebabkan puso atau gagal panen. Sulitnya pemasaran benih juga menjadi kendala tercapainya target PAD karena beberapa hasil panen masih berupa benih yang belum terjual.

3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berakhirnya tahun anggaran 2022 masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Tindak lanjut hasil evaluasi sistem akuntabilitas tahun 2022 disajikan sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan hasil capaian kinerja sasaran strategis seluruhnya masuk dalam kategori "sangat berhasil" serta adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
- Sasaran strategis Dinas pertanian yang ke dua, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah belum mencapai target yang diharapkan, sehingga perlu adanya evaluasi dan solusi untuk perbaikan capaian kinerja di tahun yang akan datang;
- Faktor pendorong keberhasilan dan penghambat capaian kinerja telah diidentifikasi dan dianalisa untuk dapat ditindaklanjuti dan dijadikan bahan dalam perbaikan pencapaian target di tahun anggaran yang akan datang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang, yaitu:

- Mengoptimalkan peran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sehingga tepat sasaran dalam upaya peningkatan PDRB sektor pertanian;
- Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi di lingkungan internal sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pelayanan Dinas Pertanian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022



**PERJANJIAN KNERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

Dokumn singha mawujudkan manganter pemerintahan yang efektif, sampson, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandas bingon di bawah in:

Nama : **H. MUCH. RONY, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **HJ. MUSDJIDAH WAHAB**
Jabatan : **BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanj akan mawujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian dan menggenit tindakan yang dipaparkan dalam rangka pambinaan pambinaan dan pambinaan.

Pihak Kedua
BUPATI JOMBANG

HJ. MUSDJIDAH WAHAB

Jombang,
Ditahi Demensi
**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATE# JOMBANG**

H. MUCH. RONY, MM.
Pembina Tingkat II
NIP. 19671019 198203 1 006



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-P) Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan di bawah ini:

Nama : **Ir. MUCH RONY, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HI. MUEDJIDAH WAHAB**
Jabatan : **BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seluruhnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JOMBANG

HI. MUEDJIDAH WAHAB

Jombang,
Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG**

Ir. MUCH RONY, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 196203 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Pertumbuhan produksi pangan tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pangan tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	5,15%
2.	Meningkatkan akurabilitas dan kinerja pengingat daerah	NIA evaluasi ANP Pengingat Daerah	77,5 (88)

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDUKSI UK PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya pemanfaatan mekanisasi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemerataan pemanfaatan mekanisasi pertanian	24,15%	17.997.314.188
2.	Meningkatnya Nilai indeks ketahanan (PI)	Program Penyediaan dan pengembangan Fasilitas Pertanian	Meningkatnya ketahanan (PI)	128,7%	3855.081.390
3.	Minimnya keterlambatan hasil panen pada budidaya pertanian	Program Pengendalian dan Pemantauan dan Basah Pertanian	Pengendalian keterlambatan hasil panen	0,32 %	645.213.350
4.	Meningkatnya aspek pertanian yang memiliki potensi	Program Pertanian Usaha Petani	Pertumbuhan aspek pertanian	1,10%	21.284.259
5.	Meningkatnya produksi pangan	Program Pertanian Daerah	Peningkatan produksi pangan		2.347.631.513
			Padi	0,50%	
			Jagung	0,50%	
			Kacang	0,50%	
			Gula Merah	0,50%	
			Gula Putih	0,50%	
			Kacang Tanah	0,50%	
			Terdapat	0,50%	
			Jahe	0,50%	
			Kopi	0,50%	
5.	Meningkatnya kinerja aparat	Program Peningkatan Kinerja Petani Daerah Kabupaten Kota	Peningkatan kinerja aparat daerah	10%	20.106.077.090

Plhat Kedua
BUPATI JOMBANG

H. MUJICAHWANA

Jombang,
Plhat Pertama
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG

H. MUJICAHWANA
Plhat Pertama
NIK. 19670310 199203 1 006



